

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemerintah dalam program *Universal Health Coverage* di Kota Semarang tergolong cukup berhasil guna memberikan memberikan akses yang merata kepada layanan kesehatan berkualitas untuk semua orang tanpa terjadi masalah finansial. Implementor Program *Universal Health Coverage* di Kota Semarang memiliki kinerja yang baik sesuai dengan teori impementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dimana dari semua variabel yaitu 1) Standar dan tujuan kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Hubungan antar organisasi, 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik, 6) Disposisi telah terbukti terlaksana dari pencapaian Pemerintah Kota Semarang dengan adanya program *Universal Health Coverage* di Kota Semarang untuk meningkatkan kepesertaan *Universal Health Coverage* (UHC) dengan mendapatkan *UHC Award* 2023 sebagai salah satu kota tertinggi dalam pencapaian UHC, Kota Semarang juga mendapatkan penghargaan atas komitmennya mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2022 dan Pemerintah Kota Semarang juga mendapatkan *UHC Award* karena kepesertaan warganya mencapai 99 persen lebih. Keberhasilan program ini juga ditandai dengan kepesertaan program *Universal Health Coverage* (UHC) di Kota Semarang yang di biayai oleh APBD telah meningkat jumlahnya dari awal implementasinya tahun 2018 dengan rata rata kepesertaan di tahun 2018 berjumlah 209,385 kemudian kepesertaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadi 376,149 peserta pada akhir tahun 2022.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam program *Universal Health Coverage* di Kota Semarang dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangatlah penting dalam pengimplementasian kebijakan, khususnya komunikasi antar pemangku kepentingan yang akan sangat membantu saat proses pendaftaran UHC bagi masyarakat yang kurang paham terhadap prosedur pendaftaran, sehingga proses pendaftaran dapat berlangsung lebih singkat.

2. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dinas Kesehatan dapat memperbanyak aktor politik dan kader atau tokoh masyarakat guna ikut serta menyukseskan program UHC, seperti contoh DPRD mewakilkan keluhan dari masyarakat terhadap pendaftaran UHC yang dinilai membutuhkan waktu yang lama terlebih bagi masyarakat yang membutuhkan.